

***Empowerment And Assistance Of Beneficiary Families (KPM) Of The Family Hope Program (PKH) In Improving Compliance With Commitment Verification In Watuagung Village***

**Pemberdayaan Dan Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Verifikasi Komitmen Di Desa Watuagung**

**Dzakyatur Rovidah<sup>1\*</sup>, Dimas Wahyu Rozaki<sup>2</sup>, Muhammad Fadlullah Ali<sup>1</sup>**

Fakultas Pendidikan, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Universitas Sunan Gresik<sup>1,3</sup>

Fakultas Agama Islam, Universitas Sunan Gresik<sup>2</sup>

[dzakyatur.r@lecturer.usg.ac.id](mailto:dzakyatur.r@lecturer.usg.ac.id)<sup>1</sup>

Disubmit : 12 Mei 2026, Diterima :10 Juni 2026, Terbit: 7 Juli 2026.

---

**ABSTRACT**

*This community service activity aims to raise awareness among recipients of the Family Hope Program (PKH) social assistance regarding the importance of complying with commitment verification for their specific program components—namely education, health, and social welfare—to ensure the disbursement of aid in subsequent periods. The program was designed to facilitate digital reporting via Google Forms, thereby simplifying the task for social facilitators who input data into the Ministry of Social Affairs' SIKS-NG application. Implementation involved identifying data requirements, raising awareness about commitment verification through posters, conducting training on filling out Google Forms, and evaluating form usage, particularly among elderly recipients. The results indicate that the 290 PKH recipients in Watuagung were able to complete the forms correctly, following the provided procedures and instructions. This activity is expected to foster recipient awareness regarding the appropriate use of social assistance and encourage the habit of quarterly digital reporting.*

**Keywords:** *digital reporting; Family Hope Program; commitment verification*

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tentang pentingnya kepatuhan verifikasi komitmen komponen yang dimiliki untuk proses pencairan bantuan sosial dalam periode selanjutnya. Program ini dirancang untuk memberikan informasi pelaporan secara digital melalui google form sesuai dengan komponen yang dimiliki yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berguna untuk kemudahan pendamping sosial dalam menginput laporan melalui aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial RI. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pelaksanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan data, sosialisasi tentang verifikasi komitmen dengan menggunakan poster, pelatihan pengisian google form, dan evaluasi penggunaan form terutama kepada penerima lanjut usia. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa dari 290 penerima bansos PKH di Watuagung yang memiliki komponen mampu melakukan pengisian secara baik dan benar sesuai dengan alur dan intruksi yang diberikan. Kegiatan ini diharapkan menjadi kesadaran penerima untuk selalu menggunakan bansosnya secara tepat sasaran serta membiasakan diri untuk pelaporan secara digital secara triwulanan.

**Kata Kunci:** laporan digital; program keluarga harapan; verifikasi komitmen

## 1. Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan conditional cash transfer (CCT) atau yang disebut dengan Bantuan Tunai Bersyarat yang diberikan kepada Penerima Manfaat setiap 3 bulan sekali atau secara triwulan. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang memiliki beberapa kriteria komponen seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial dan berada pada Desil 1- 4 dimana KPM memiliki ambang tingkat kesejahteraan yang layak menerima bantuan sosial menurut Keputusan Menteri Sosial 79/HUK/2025. Bantuan tunai bersyarat ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui perubahan mindset yang lebih baik dan kepatuhan komitmen penerimanya atas komponen yang dimiliki. Menurut data dari Kemensos RI penerima bantuan sosial PKH sebanyak 16.5 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki komponen yang beragam sesuai dengan kondisi keluarga baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program PKH saat ini masih menjadi prioritas program bantuan sosial meskipun masih banyak KPM yang masih bergantung dengan bansos PKH dengan kondisi usia masih tergolong produktif.

Salah satu lingkup objek pengabdian masyarakat terkait PKH adalah Mengare Kecamatan Bungah, Gresik. Mengare terletak di Sebelah Barat daya kecamatan Bungah, Kab.Gresik dengan jarak 12 km dari pintu masuk Desa Sembayat. Batas wilayah sebelah selatan yaitu Kecamatan Manyar, sebelah barat sungai Kramat, sebelah utara sungai Cemara, dan timur hingga Selatan berbatasan langsung dengan selat Madura. Mengare terbagi menjadi 3 Desa, yaitu Desa Watuagung, Kramat, dan Tajungwidoro dengan jumlah penduduk 10.668 jiwa. Menurut BPD Desa Tajungwidoro pada RPJM Desa tahun 2013, Mengare adalah daerah wilayah kepulauan, sehingga penduduk sekitar mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh tambak.

Secara umum, kondisi masyarakat di ketiga desa tersebut dari kalangan menengah kebawah dan berada pada garis kemiskinan karena tidak menentunya hasil tangkapan ikan yang dilakukan sehari-harinya [4]. Namun, objek penelitian ini hanya sebatas pada desa Watuagung karena memiliki kultur masyarakat yang sedikit berbeda dengan kedua desa lainnya. Secara umum, kondisi KPM PKH Watuagung minim literasi, mudah menerima berita yang belum tentu benar, dan lebih mementingkan untuk bertanya mengenai penyebab bantuan tidak cair dibandingkan mengenai komitmen komponen yang dimiliki. Tidak hanya itu saja, Watuagung pernah memiliki sejarah kelam terkait permasalahan dan konflik antar masyarakat sekitar terkait dugaan penyelewengan bansos PKH dan menjadi trauma tersendiri oleh KPM PKH di desa Watuagung. Upaya pemerintah saat ini dalam penegasan bansos sangat ketat. Mulai dari penyandingan data administrasi kependudukan, pemberdayaan KPM agar lebih mandiri, dan kegiatan verifikasi komitmen yang mulai diberlakukan kembali melalui aplikasi SIKS NG Pendamping. Kerjasama antara KPM PKH dan pendamping sosial PKH sangat dipertanggungjawabkan karena berhubungan erat dengan komitmen tidaknya KPM PKH dan adanya sanksi diberhentikan kepesertaan bansos apabila 3 kali berturut-turut KPM tidak komitmen atas komponen yang dimiliki. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki beberapa kriteria kejadian yang harus dipenuhi oleh KPM [2]. Pada awal mula adanya program, verifikasi komitmen dilakukan secara manual menggunakan form yang harus diisi oleh Pendamping dengan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial [10]. Komponen PKH yang dimaksud adalah Pertama, Pendidikan. apabila dalam satu keluarga terdapat anak sekolah baik jenjang SD, SMP, atau SMA. Syarat komitmen adalah apabila anak sekolah dengan presensi kehadiran minimal 85%. Kedua, Kesehatan. Komponen ini diperuntukkan apabila KPM adalah seorang ibu hamil dengan batas kehamilan yang kedua dan atau yang memiliki anak usia balita. Syarat komitmen adalah wajib mendatangi faskes atau posyandu. Ketiga, Kesejahteraan Sosial. Apabila dalam anggota keluarga terdapat disabilitas atau lansia. Syarat komitmen melalui kehadiran ke pelayanan kesehatan atau wujud anggota keluarga sedang merawat lansia atau disabilitas.

Berbagai kondisi tersebut, KPM PKH saat ini diwajibkan untuk melakukan foto bukti berupa presensi sekolah, buku KIA, foto perawatan diri, yang harus dikirim ke Pendamping PKH untuk kemudian dilakukan verifikasi komitmen melalui aplikasi SIKS NG. Kendala yang dihadapi adalah, KPM PKH mayoritas adalah ibu-ibu dengan rentan usia 40-60 ke atas sehingga sulit untuk dilakukan edukasi mengenai proses inputting data komitmen tersebut melalui aplikasi gform. Oleh karena itu, masih banyaknya KPM yang lebih memilih mengirim bukti foto melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor pendamping PKH dan akan memberikan kesulitan tersendiri bagi Pendamping PKH untuk melakukan inputting data di aplikasi SIKS NG.

Urgensi kegiatan ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat, tidak memandang usia dan menuntut para masyarakat desa khususnya penerima bansos PKH untuk beradaptasi dan selalu mengedepankan kepentingan dalam penggunaan bantuan sosial seperti pendidikan, dengan diketahuinya kewajiban pengumpulan presensi minimal 85% kehadiran, maka orang tua harus berkewajiban penuh untuk memastikan kehadiran anaknya di sekolah. Misalnya, Kesehatan, maka para penerima yang sedang hamil atau memiliki balita harus rutin melakukan pemeriksaan di faskes terdekat. Upaya ini menjadi krusial di Desa Watuagung agar penerima bansos menyadari penuh betapa pentingnya penggunaan bantuan sosial untuk keperluan sesuai dengan komponen yang mereka miliki.

## 2. Metode

Metode pada pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis sebagai dasar pelaksanaan program dan mengatasi permasalahan prioritas yang teridentifikasi. Pemetaan masalah menjadi instrumen awal untuk mengetahui permasalahan KPM PKH Watuagung mengenai kesulitan yang dihadapi saat melakukan pelaporan verifikasi komitmen. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa masih belum ada pemahaman yang berarti oleh KPM PKH mengenai alur pelaporan, cara pelaporan, bukti pelaporan, dan tata cara pengisian laporan sehingga masih terdapat beberapa KPM PKH yang masih belum mengisi secara baik dan benar terutama penerima PKH dari kalangan lansia. Sebagai Solusi yang ditawarkan, tim pengabdian menginisiasi program pendampingan pelaporan melalui pelaporan digital menggunakan google form dengan alur mekanisme pengisian yang menarik melalui poster.

Solusi tersebut dilakukan atas dasar urgensi untuk menciptakan pelaporan digital yang sistematis, cepat, dan tepat serta meningkatkan kesadaran KPM PKH mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan verifikasi komitmen untuk pencairan bansos periode selanjutnya dan perubahan mindset untuk menggunakan bantuan sosial sesuai dengan komponen yang dimiliki. Guna memberikan Solusi yang aplikatif dan berkelanjutan, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena mengutamakan kolaborasi aktif antara tim pengabdian dan KPM PKH Watuagung yang diawali dengan identifikasi masalah, perencanaan dengan penyusunan pertanyaan, observasi dan evaluasi hasil implementasi pelaporan secara digital.

PAR memiliki kelebihan sebagai jenis pendekatan atau metode PkM karena bersifat saling menguntungkan dan memberikan edukasi dalam memecahkan masalah yang ada (Qomar et al., 2022; Sufia et al., 2022). Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap karena banyaknya penerima bansos PKH dan dikelompokkan sesuai dengan wilayah RT/RW masing-masing. Kegiatan pertama dilaksanakan pada 04 Mei 2026 secara luring sebagai pelaksanaan awal yakni sosialisasi kepada warga dan perizinan melalui Kepala Desa Watuagung. metode pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan ini dilaksanakan dengan menggali permasalahan dengan berkomunikasi secara langsung bersama KPM PKH untuk memecahkan masalah yang didasarkan dengan kondisi lingkungan guna mendukung program. Pertemuan awal bersama tim pengabdian juga dilakukan dengan membahas hal-hal seperti: (1) penentuan waktu pelatihan, (2) tempat

kegiatan dilaksanakan, (3) perizinan kepada pemerintahan desa Watuagung dan institusi Universitas Sunan Gresik, (4) sarana dan prasarana yang digunakan, (5) materi yang akan disampaikan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini meliputi: kegiatan pendampingan dan penyuluhan terkait materi mengenai esensi verifikasi komitmen penerima bansos PKH dengan menggunakan alat bantu berupa poster untuk memudahkan KPM dalam memahami tujuan program, alur dan tata cara pengisian melalui gform, dan latihan secara langsung pengisian melalui gform.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, setelah sesi penyuluhan awal selesai mengenai pengisian verifikasi komitmen, terdapat latihan secara langsung yang dilakukan oleh KPM PKH. oleh karena itu pada saat penyuluhan diwajibkan KPM untuk membawa smartphone. Setelah latihan pengisian selesai akan diketahui berapa banyak KPM yang mampu mengisi dengan baik dan benar.

Evaluasi kedua yaitu mengenai data kebutuhan yang harus disampaikan ke aplikasi SIKS NG apakah terdapat hal-hal yang kurang kemudian digunakan untuk perbaikan di pengisian selanjutnya. pada tahap akhir, dilakukan pengisian kembali dengan mekanisme tambahan data yang telah disesuaikan serta perbaikan atas masukan dari KPM PKH.

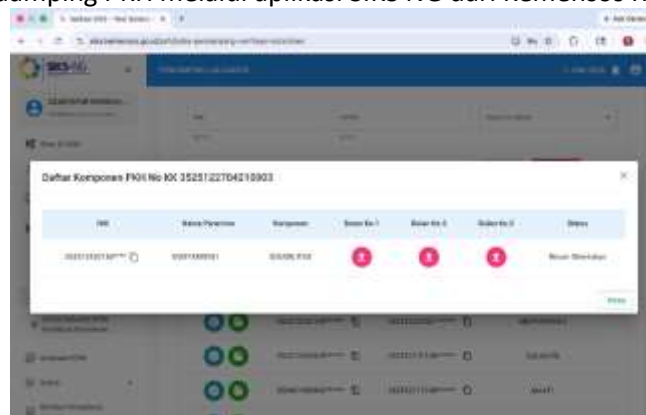
Evaluasi tersebut sebagai acuan untuk langkah kedepannya apakah harus ada isian gform yang diperbaiki atau ketidaktepatan KPM dalam pengisian maupun upload bukti dukung. Evaluasi kedua, monitoring setelah semua program selesai.

4. Tahap Keberlanjutan Program

Tindak lanjut akan diambil untuk mencapai tujuan, solusi, dan target. Setelah evaluasi, perencanaan keberlanjutan program. Analisis kekurangan dan pencapaian program akan menjadi dasar perencanaan keberlanjutan program. Rencana keberlanjutan program mencakup penerapan pengisian verifikasi komitmen secara berkala atau triwulanan untuk memudahkan pendamping dalam menyelesaikan tugas verifikasi komitmen di aplikasi SIKS NG.

**3. Hasil Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan bersama KPM PKH Desa Watuagung, Mengare yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan verifikasi komitmen atas bantuan PKH yang diperoleh. Kegiatan ini menghasilkan pemahaman terkait pengisian verifikasi komitmen melalui gform sebagai bahan untuk pelaporan yang dilakukan oleh pendamping PKH melalui aplikasi SIKS NG dari Kemensos RI.



**Gambar 1. Tampilan pelaporan Verifikasi Komitmen di SIKS NG Kemsos RI**

Ketepatan dan pengisian verifikasi komitmen sesuai dengan batas yang ditentukan menjadi penilaian kinerja Pendamping PKH dan juga sekaligus sebagai persyaratan pencairan

bantuan PKH di periode selanjutnya (triwulanan). Dengan adanya urgensi kegiatan tersebut maka verifikasi komitmen sudah seharusnya dilakukan sistem pelaporan secara digital untuk mempermudah dalam pelaporan serta KPM PKH dapat menyadari sepenuhnya bahwa bantuan PKH dipergunakan sesuai dengan komponen yang dimiliki.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga berhasil meningkatkan koordinasi antara pendamping PKH, perangkat desa, dan keluarga penerima manfaat. Proses pengiriman informasi menjadi lebih cepat dan efisien ketika orang bekerja sama. Melalui komunikasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, berbagai hambatan yang sebelumnya menghambat pelaporan, seperti kurangnya informasi dan kesalahan administrasi, dapat dikurangi.

Meningkatnya persentase kepatuhan pelaporan verifikasi komitmen PKH adalah bukti nyata dari program ini. Keluarga penerima manfaat menjadi lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka terkait pemeriksaan kesehatan, kehadiran sekolah anak, dan pelaporan data pendukung lainnya. Peningkatan kepatuhan meningkatkan administrasi program dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga.

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat ini dapat dianggap berhasil dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap laporan verifikasi komitmen PKH. Meningkatnya pengetahuan peserta, sinergi antar pemangku kepentingan, dan peningkatan kepatuhan pelaporan adalah semua bukti keberhasilan ini. Untuk memastikan bahwa Program Keluarga Harapan bermanfaat bagi setiap anggota keluarga, perlu ada pendampingan yang berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai.

### **Tahap Persiapan**

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan verifikasi komitmen Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga penerima manfaat harus mengidentifikasi kebutuhan mereka. Tim pelaksana bekerja sama dengan pendamping PKH, pemerintah desa, dan pihak terkait untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan dan masalah yang sering terjadi selama proses verifikasi komitmen. Koordinasi tersebut telah dilakukan pada tanggal 25 April 2026 secara langsung. Didasarkan pada temuan ini, materi, pendekatan pendampingan, dan rencana pelaksanaan kegiatan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tim pengabdian secara sistematis membuat rencana kegiatan. Ini termasuk menentukan jadwal, lokasi, dan tujuan peserta, serta membagi tugas antara anggota tim. Materi sosialisasi dan pendampingan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami agar seluruh peserta dapat menerimanya. Selain itu, berbagai sarana pendukung, seperti modul, lembar informasi, media presentasi, dan instrumen evaluasi, disiapkan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan memudahkan proses penyebaran informasi kepada peserta.



**Gambar 2. Koordinasi dengan Kepala Desa Watuagung**

Untuk memastikan bahwa kegiatan siap untuk dilaksanakan, koordinasi teknis dengan seluruh pihak yang terlibat dilakukan pada tahap akhir persiapan. Perangkat desa dan tim pengabdian bersama pendamping PKH melakukan sosialisasi awal kepada calon peserta mengenai tujuan, keuntungan, dan jadwal kegiatan. Keluarga penerima manfaat diharapkan hadir selama kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan persiapan yang matang, program diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.

### Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan kepada seluruh peserta yang terdiri atas keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH, serta perangkat desa. Pada sesi ini, tim pengabdian menjelaskan pentingnya kepatuhan dalam pelaporan verifikasi komitmen sebagai salah satu syarat keberlangsungan program. Peserta juga diberikan gambaran mengenai alur kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mereka dapat mengikuti setiap tahapan dengan baik dan aktif.

Selanjutnya, tim pengabdian memberikan sosialisasi mengenai ketentuan verifikasi komitmen PKH yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Materi



disampaikan melalui presentasi, diskusi interaktif, serta pemberian contoh kasus yang sering terjadi di lapangan. Melalui metode ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, dokumen yang diperlukan, serta prosedur pelaporan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Gambar 3. Sosialisasi Pelaporan Verifikasi Komitmen melalui *gform***

Dalam hal ini, tim pengabdian berinisiatif untuk membuat poster mengenai apa itu verifikasi komitmen dan alur tata cara pengisian laporan melalui *gform*. Hal ini dimaksudkan agar KPM lebih mudah dan tanggap melakukan verifikasi komitmen.

Pada tahap berikutnya, dilakukan pendampingan teknis kepada peserta dalam proses pelaporan verifikasi komitmen. Tim pengabdian bersama pendamping PKH memberikan bimbingan secara langsung mengenai cara mengisi formulir, memeriksa kelengkapan data, serta memastikan kesesuaian informasi yang akan dilaporkan. Pendampingan ini dilakukan secara individual maupun kelompok sehingga peserta yang mengalami kesulitan dapat memperoleh bantuan secara optimal

### Verifikasi Komitmen Pendidikan

Verifikasi komitmen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan proses penting untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga penerima manfaat benar-benar mengikuti kegiatan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui proses ini, data kehadiran dan status sekolah peserta diperiksa secara berkala untuk memastikan bahwa

bantuan yang diberikan mendukung peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan. Verifikasi yang akurat juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program serta memastikan bantuan tersalurkan kepada keluarga yang memenuhi kewajiban pendidikan.

Untuk menuntaskan verifikasi komitmen pendidikan, diperlukan koordinasi yang baik antara pendamping PKH, pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Pendamping perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala serta menjalin komunikasi aktif dengan sekolah untuk memastikan informasi peserta selalu akurat. Pemanfaatan sistem digital yang lebih terintegrasi juga dapat mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kesalahan data. Selain itu, peningkatan kesadaran keluarga penerima manfaat mengenai pentingnya memenuhi komitmen pendidikan akan membantu memperlancar proses verifikasi sekaligus mendukung tujuan utama PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu tim pengabdian menggunakan tools gform sebagai langkah cepat dalam pelaporan verifikasi komitmen yang dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. link pelaporan tersebut. link pelaporan dapat diakses melalui [bit.ly/verkompendidikan2026](https://bit.ly/verkompendidikan2026). untuk memudahkan KPM PKH

dalam mengisi, tim pengabdian membuatkan poster tata cara pengisian verifikasi komitmen pendidikan.



Gambar 4. Poster Pengertian Verifikasi Komitmen dan Poster tata cara pengisian verkom pendidikan

### Verifikasi Komitmen Kesehatan

Pelaksanaan verifikasi komitmen kesehatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dilakukan melalui koordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memastikan pemenuhan kewajiban pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan anggota keluarga yang menjadi komponen kesehatan. Kegiatan verifikasi dilaksanakan dengan mencocokkan data kehadiran dan pelayanan kesehatan yang tercatat pada fasilitas kesehatan dengan data KPM PKH. Secara umum, sebagian besar KPM telah memenuhi komitmen kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan verifikasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain masih adanya KPM yang tidak rutin memanfaatkan layanan kesehatan karena kesibukan bekerja, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, serta keterbatasan akses transportasi menuju fasilitas kesehatan bagi KPM yang berada di wilayah yang cukup jauh. Selain itu, ditemukan pula keterlambatan pelaporan atau pencatatan data pelayanan kesehatan yang menyebabkan proses verifikasi memerlukan waktu lebih lama.

Sebagai upaya penyelesaian kendala tersebut, pendamping PKH terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM mengenai pentingnya pemenuhan komitmen kesehatan. Pendamping juga meningkatkan koordinasi dengan pihak fasilitas kesehatan untuk mempercepat proses validasi data serta melakukan kunjungan rumah kepada KPM yang belum memenuhi komitmen guna memberikan motivasi dan pendampingan. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan tingkat kepatuhan KPM terhadap komitmen kesehatan dapat terus meningkat dan tujuan program PKH dapat tercapai secara optimal.

Oleh karena itu tim pengabdian menggunakan tools gform sebagai langkah cepat dalam pelaporan verifikasi komitmen yang dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. link pelaporan tersebut. link pelaporan dapat diakses melalui [bit.ly/verkomkesehatan2026](https://bit.ly/verkomkesehatan2026) untuk memudahkan KPM PKH

dalam mengisi, tim pengabdian membuat poster tata cara pengisian verifikasi komitmen kesehatan.

#### **Verifikasi Komitmen Kesejahteraan Sosial**

Pelaksanaan verifikasi komitmen kesejahteraan sosial dilakukan untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dan penyandang disabilitas berat telah memperoleh layanan dan perhatian sesuai ketentuan program. Verifikasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat desa, keluarga KPM, serta pihak terkait lainnya dengan melakukan pengecekan kondisi penerima manfaat dan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar KPM telah berupaya memberikan perawatan dan pendampingan kepada anggota keluarga yang menjadi komponen kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan verifikasi, terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan. Beberapa keluarga masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban pemenuhan komitmen kesejahteraan sosial, sehingga perhatian terhadap perawatan lanjut usia maupun penyandang disabilitas belum optimal. Selain itu, keterbatasan ekonomi keluarga dan kurangnya akses terhadap layanan sosial tertentu turut memengaruhi kualitas pemenuhan komitmen. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam memperoleh data pendukung yang lengkap untuk proses verifikasi, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pendamping PKH secara aktif melakukan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan komitmen kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan kepedulian terhadap anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Pendamping juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, tenaga kesejahteraan sosial, dan pihak terkait lainnya guna mempermudah akses layanan sosial bagi KPM. Selain itu, dilakukan pemantauan dan pendampingan secara berkala kepada keluarga yang masih memerlukan dukungan agar komitmen kesejahteraan sosial dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan.

#### **Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Evaluasi kegiatan pelatihan terdiri dari dua tahap, yaitu setelah sesi penyuluhan secara langsung dan setelah pengabdian telah dilakukan. Pertama, sesudah sesi penyuluhan dan penyampaian materi. Kedua, setelah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan selesai.

Selain pendampingan teknis, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab dan konsultasi. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi selama proses pemenuhan dan pelaporan komitmen PKH. Tim pengabdian memberikan solusi dan penjelasan atas permasalahan yang muncul, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian data, maupun kurangnya pemahaman mengenai prosedur administrasi. Interaksi ini membantu meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Tahap pelaksanaan ini menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya kepatuhan yang lebih baik serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di masyarakat.

#### **5. Penutup**

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar KPM telah berupaya memenuhi komitmen yang ditetapkan, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman, akses terhadap layanan dasar, serta ketidaksesuaian data pendukung. Melalui koordinasi dengan pemerintah desa, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, dan pihak terkait lainnya, berbagai kendala tersebut dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada institusi atas dukungan pendanaan melalui skema dana internal sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh mitra, peserta, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dukungan dan kerja sama yang diberikan menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

### Daftar Pustaka

- Asih, A. A. M., Askari, S., & Sofiani, T. (2022). Implementation of social protection policy through Program Keluarga Harapan (PKH) in rural society. *Asian Journal of Law and Humanity*, 2(1), 84–94.
- AshShidqi, M. H., & Puspitasari, D. (2023). Studi fenomenologis modal sosial warga masyarakat nelayan di daerah pesisir. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 264–270.
- Capulong, C. M., & Cuevas, A. G. (2024). The effectiveness of conditional cash transfer program: A case of rural and urban beneficiaries in Philippines. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(1), 96–114.
- Halim, S., Desminar, Mursal, Rida Yanti, E., & Dilena, R. (2024). Community understanding of obligations as a recipient of PKH assistance in the perspective of Islamic law. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 6(2), 325–342.
- Hartarto, A., Kurniawati, D., & Azhar, M. (2022). Program Keluarga Harapan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan preventif pada keluarga penerima manfaat. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(2), 147–156.
- Kawabata, M. K., & Camargo Junior, A. S. (2023). *E-government innovation initiatives in public administration: A systematic literature review and a research agenda*. *Administration & Society*, 55(9), 1758–1790. <https://doi.org/10.1177/00953997231185847>
- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *International Journal of Information Management*, 73, Article 102690. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- Nasution, A. F., & Satria, H. W. (2023). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(1), 34–45.
- Novianto. (2023). Systematic literature review: Models of digital transformation in the public sector. *Policy & Governance Review*, 7(2), 170–194. <https://doi.org/10.30589/pgr.v7i2.753>
- Putri, N., Rachmayanti, A. A., & Pramesti, Y. P. (2024). A narrative review: How to optimize Program Keluarga Harapan in addressing nutritional issues in Indonesia? *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*, 4(1), 29–41.
- Rahmawati, D., & Biduri, S. (2023). Accountability boost: Internet reporting and good governance in action. *Academia Open*, 8(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.3579>
- Susantyo, B., & Nainggolan, T. (2018). Integrasi penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Quantum*, 14(26), 73–87.
- Ulandari, S. A., & Sampurna, A. (2025). From poverty to inequality: Evaluation of the implementation of the Family Hope Program (PKH) and its impact on social inequality in North Sumatra. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 65–76.
- Utami, I. P., Rangga, K. K., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2021). Kinerja pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sains Humaniora dan Pembangunan (JSHP)*, 5(1), 19–28.

Widodo, J., & Kusnan, K. (2023). Mapping and analyzing e-government sentiments in local governments in Indonesia. *Society*, 11(2), 434–457. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558>